

# **RENCANA KERJA**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS**

**TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS**

L.R.AGIL KUSUMADYA NO.44 TELP (0291) 435111KUDUS 59343

Email : [dprd@kuduskab.go.id](mailto:dprd@kuduskab.go.id) Website : [dprd.kuduskab.go.id](http://dprd.kuduskab.go.id)



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
Jalan R.Agil Kusumadya Nomor 44 Telp. (0291) 435111 Fax. (0291) 435594  
**KUDUS 59343**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 050.24/018/0703/2020

TENTANG  
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor : 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kudus  
Pada tanggal 23 Oktober 2020

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN KUDUS

SETWAN



Drs. JADMIKO MUHARDI SETIYANTO



# DAFTAR ISI

## (RENCANA KERJA )

Halaman Judul.....	i	
Daftar isi .....	ii	
BAB I		
PENDAHULUAN.....	1	
1.1 Latar Belakang.....	1	
1.2 Landasan Hukum.....	2	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3	
1.4 Sistematika Penulisan.....	3	
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	5
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2017 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2	Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.3	Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.....	10
2.4	Review terhadap rancangan awal RKPD.....	10
BAB III	TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	12
3.1	Telaahan Kebijakan terhadap Nasional .....	12
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD.....	13
3.3	Program dan Kegiatan tahun 2020.....	14
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	16
BAB V	PENUTUP.....	17
LAMPIRAN		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pengertian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus tahun 2021 merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus tahun 2020 yang mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus tahun 2018 – 2023 yang mengamanatkan bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategik dari masing masing SKPD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Kabupaten Kudus.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2021 diawali dengan musyawarah antar bagian-bagian yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus.

Dalam rangka efektif serta efisien perencanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus, Sekretaris DPRD menindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2021.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193).



7. Peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 31);

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Penyusunan Rancangan Awal Renja  
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus tahun 2021.
2. Tujuan Penyusunan Rancangan Awal Renja
  - a. Memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. Guna memberikan arah pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. Agar perencanaan lebih berkesinambungan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan memuaskan pihak-pihak yang harus dilayani.
  - d. Untuk memasukkan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2021.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

Bab II Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD pada tahun lalu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan target capaian program yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja. Hasil Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun lalu akan menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan target capaian program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2019 seperti dituangkan dalam tabel 2.1 sebagaimana terlampir.

A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan adalah

1. Program Pelayanan Administrasi Umum pada Kegiatan :

a. Peningkatan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja, pada kegiatan ini anggaran hanya terealisasi sebesar 40,17% karena ada beberapa dokumen perencanaan yang belum maksimal selesai dikoreksi /belum final sehingga anggaran penggandaan belum terserap maksimal. Penyerapan anggaran belum memenuhi target, tetapi fisik kegiatan telah mencapai 100% /semua target dokumen pelaporan perencanaan telah selesai dikerjakan.

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak tercapai sesuai target antara lain :

- Sub kegiatan belanja jasa tenaga pelaksana kegiatan, belanja premi asuransi kesehatan dan belanja premi jaminan ketenagakerjaan tidak terserap maksimal

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus dan  
Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus s/d tahun 2020

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s/d 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Capaian Program Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2020	
					Target SKPD Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
<b>4.01.401.04.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran</b>	-	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	-	<b>100%</b>
<b>4.01.401.04.01.01</b>	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100%	100%	100%
<b>4.01.401.04.01.02</b>	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telepon, listrik dan air	12 bln	12 bln	12 Bln	12 Bln	100%	100%	100%	100%
<b>4.01.401.04.01.05</b>	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya asuransi gedung kantor	12 bln	12 bln	12 Bln	12 Bln	100%	100%	100%	100%
<b>4.01.401.04.01.06</b>	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional mobil dan motor	44 unit	39 unit	43 unit	43 unit	100%	49 unit	49 unit	100%
<b>4.01.401.04.01.07</b>	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium kegiatan dan uang lembur	12 Bln	12 bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 bln	12 bln	100%
		Tersedianya honorarium PHD	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%	1 orang	1 orang	100%
<b>4.01.401.04.01.08</b>	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	12 Bln	12 bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 bln	12 bln	100%
<b>4.01.401.04.01.09</b>	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	12 bln	12 bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 bln	12 bln	100%

4.01.401.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bln	12 bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 bln	12 bln	100%
4.01.401.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bln	12 bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 bln	12 bln	100%
4.01.401.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	12 bln	12 bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 bln	12 bln	100%
4.01.401.04.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	12 bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 bln	12 bln	100%
4.01.401.04.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya perlengkapan dan peralatan rumah tangga	12 Bln	12 bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 bln	12 bln	100%
4.01.401.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bln	12 bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 bln	12 bln	100%
4.01.401.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan/minuman harian pegawai dan tamu	12 bln	12 bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 bln	12 bln	100%
		Tersedianya honor outsourcing tenaga pramu tamu	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	100%	4 orang	4 orang	100%
4.01.401.04.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ; Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bln	12 bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 bln	12 bln	100%
4.01.401.04.02	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur</b>	-	<b>100%</b>				<b>100%</b>		
4.01.401.04.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional	26 unit	3 unit	2 unit	2 unit	100%	4 unit	4 unit	100%
4.01.401.04.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	43 unit	3 unit				6 jenis	6 jenis	100%
		Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	9 unit	2 unit	7 unit	7 unit	100%	37 unit	37 unit	100%
4.01.401.04.02.10	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur	86 unit	79 unit	30 unit	0 unit	0%	28 unit	28 unit	100%
4.01.401.04.02.11	Pengadaan /Sewa Tanah/Tempat/Gedung	Terbayarnya sewa tanah	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%

4.01.401.04.02.12	Pembangunan Bangunan Pelengkap Gedung Kantor	Terlaksananya bangunan pelengkap gedung kantor	2 paket	1 paket	0 paket	0 paket	0%	1 paket	0 paket	0%
4.01.401.04.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya honor outsourcing tenaga keaman kantor Tersedianya honor outsourcing tenaga teknis sarana dan prasarana	31 orang	31 org	26 orang	26 orang	100%	26 orang	26 orang	100%
4.01.401.04.02.24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional mobil/motor	44 unit	42 unit	43 unit	43 unit	100%	49 unit	49 unit	100%
		Tersedianya Honor Outsorcing Tenaga Pengemudi	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	100%	4 orang	4 orang	100%
4.01.401.04.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	30 buah	34 bh	30 buah	30 buah	100%	30 buah	33 buah	110%
4.01.401.04.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	3 paket	0 paket	1 paket	0 paket	0 %	1 paket	0 paket	0%
4.01.401.04.03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		100%				100%		
4.01.401.04.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	240 stel	205 stel	240 stel	240 stel	100%	224 stel	176 stel	78,6%
4.01.401.04.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Aparatur</b>		100%				100%		
4.01.401.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta pendidikan dan pelatihan	32 orang	20 org	20 orang	20 orang	100%	31 orang	31 orang	100%
4.01.401.04.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terkirimnya peserta Bintek Perundang-undangan	32 orang	45 org	36 orang	36 orang	100%	46 orang	46 orang	100%
4.01.401.04.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur</b>		100%				100%		
4.01.401.04.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Tersusunnya laporan LKPJ,LPPD, Lakip, dan	6 dokumen	4 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Akhir Tahun									
<b>4.01.401.04.15</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah</b>	<b>Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
<b>4.01.401.04.15.01</b>	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Perda	18 perda	3 perda	12 perda	7 perda	57%	12 perda	3 perda	25 %	
<b>4.01.401.04.15.02</b>	Hearing/Dialog dan koordinasi dengan Pejabat	Terlaksananya kegiatan Hearing	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%	
<b>4.01.401.04.15.03</b>	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Terlaksananya rapat rapat alat kelengkapan	259 kali	270 kali	252 kali	242 kali	90%	193 kali	193 kali	100%	
<b>4.01.401.04.15.04</b>	Rapat-Rapat Paripurna	Terlaksananya rapat rapat paripurna	21 kali	21 kali	28 kali	28 kali	100%	21 kali	21 kali	100%	
<b>4.01.401.04.15.05</b>	Kegiatan Reses	Terlaksananya kegiatan Reses	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%	3 kali	3 kali	100%	
<b>4.01.401.04.15.06</b>	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	18 kali	3 kali	6 kali	6 kali	100%	6 kali	6 kali	100%	
<b>4.01.401.04.15.07</b>	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya workshop, kunker, dan konsul dalam dan luar propinsi	68 kali	80 kali	82 kali	82 kali	100%	174 kali	174 kali	100%	
<b>4.01.401.04.15.09</b>	Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan DPRD	Tersedianya jaminan pelayanan kesehatan DPRD	45 org	20 org	45 org	45 Orang	45 orang	100%	45 orang	45 orang	
<b>2.10.4.01.04.18</b>	<b>Program Kerja Sama Informasi Dengan Media Massa</b>	<b>Tersedianya kerjasama informasi dengan mas media</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>			
<b>2.10.4.01.04.18.02</b>	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		1500 Eks	1000 Eks	139 kali	139 kali	100%	229 kali	229 kali	100%	

Tabel 2.2.

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Kudus

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan  Analisis
				Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Program Pelayanan Administrasi Umum</b>											
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah		% kinerja & akuntabilitas	81,5	82	83	83,5	89,71	-	89,75	90	Terpenuhi
2.	Persentase Dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun		% kinerja & akuntabilitas	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Terpenuhi
3.	Persentase Penyerapan anggaran SOPD		% kinerja & akuntabilitas	70%	70%	70%	70%	85,19%	-	85,20%	85,25%	Terpenuhi
	<b>Program Peningkatan Kapasitas DPRD</b>											
4.	Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi		% kinerja & akuntabilitas	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Terpenuhi
	<b>Program Penyelenggaraan Kehumasan</b>											
5.	Persentase kegiatan DPRD yan dipublikasikan		% kinerja & akuntabilitas	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Terpenuhi



karena adanya perubahan pelaksanaan kegiatan yang semula di jasa pihak ketiga menjadi tenaga kontrak yang dikelola sendiri sehingga terjadi efisiensi anggaran.

- Sub kegiatan belanja pengadaan pakaian dinas DPRD tidak terserap maksimal karena mekanisme pengadaan menggunakan proses lelang, dan untuk tahun ini penawarannya jauh dibawah pagu anggaran.
- Sub kegiatan belanja modal pengadaan alat reproduksi (pengganda) mesin foto copy tidak terserap maksimal karena nilai kontraknya dibawah pagu anggaran.

Namun secara keseluruhan kegiatan Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan sudah memenuhi target anggaran penyerapan diatas 50% . Kegiatan tersebut mencapai realisasi anggaran sebesar 73,75% dan fisik kegiatan telah mencapai 100%

## 2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada kegiatan :

### a. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD

Pada kegiatan ini tingkat capaian kinerja sebesar 86,43% dan tingkat capaian realisasi anggaran yaitu sebesar 57,59% dikarenakan anggaran rapat paripurna istimewa pelantikan DPRD masa bakti 2019-2023 tidak terserap karena tanggal pengesahan DPPA tahun 2019 sesudah pelaksanaan pelantikan dan kegiatan fasilitasi rapat-rapat DPRD yang direncanakan Sekretariat DPRD menyesuaikan agenda kerja DPRD, sehingga ada efisiensi anggaran dikarenakan menyesuaikan agenda kerja DPRD.

### b.Fasilitasi Pengkajian Perundang-Undangan dan Penyusunan Produk Hukum

Pada kegiatan ini realisasi anggaran terserap diatas target yaitu 84,13 % tetapi target capaian kinerja pada Renstra Sekretariat DPRD sejumlah 12 Perda belum tercapai

sepenuhnya pada tahun 2019 , sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 58,33%. Hal ini disebabkan karena Ranperda yang dibahas DPRD sejumlah 17 Ranperda. Ada 8 Ranperda yang sudah dibahas dan disetujui bersama antara DPRD dan Pemkab, sedangkan 9 Ranperda sudah dibahas dan sudah difasilitasi gubernur menunggu diparipurnakan. Faktor yang menyebabkan hal ini dikarenakan adanya keberagaman politik yang ada di lembaga kedewanan sehingga tidak secara aklamasi bisa mengesahkan Ranperda yang diusulkan dan fasilitasi dari kementerian yang turunnya bisa dalam kurun satu sampai dua tahun. Untuk itu anggaran yang terealisasi merupakan capaian telah dilaksanakannya kegiatan fasilitasi Ranperda tersebut.

Hearing dilaksanakan pada saat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh Pansus III, tetapi kegiatan tersebut cukup menggunakan biaya rapat makan dan minum pada alat kelengkapan sedangkan anggaran Hearing disediakan untuk membiayai Hearing DPRD terkait isu-isu strategis yang sedang berkembang yang harus disikapi DPRD berdasarkan usulan atau permintaan pimpinan atau anggota DPRD.

c. Peningkatan Kapasitas DPRD

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah sudah dilaksanakan tetapi penggunaan anggaran perjalanan daerah mengikuti aturan jarak tempuh.

B. Realisasi program/kegiatan pada Sekretariat DPRD yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :

1. Program Pelayanan Administrasi Umum pada kegiatan :

- a. Peningkatan sistem Perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja jumlah dokumen yang dikerjakan sudah sesuai target dalam Renstra Sekretariat DPRD .

- b. Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan pada sub kegiatan Biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi , sub kegiatan penyediaan administrasi keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor, jasa surat menyurat, barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, jasa telepon, listrik dan air, asuransi gedung DPRD, jasa kebersihan kantor, sewa tanah dan makanan dan minuman harian pegawai dan tamu
  - c. Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur pada sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, pengadaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan mebeleur, pemeliharaan rutin berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin berkala mebeleur, pengadaan kendaraan dinas, belanja jasa perbaikan peralatan kantor, Pendidikan dan pelatihan Formal serta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada kegiatan :
- b. Peningkatan Kapasitas DPRD
  - c. Fasilitasi pengkajian perundang-undangan dan penyusunan produk hukum
3. Program Penyelenggaraan Kehumasan pada kegiatan :  
Fasilitasi kehumasan, publikasi dan protokol

C. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Realisasi program/kegiatan yang berjalan pada tahun 2019 tidak ada yang melebihi target kinerja hasil/keluaran. Semua program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

D. Faktor – faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program/kegiatan :

- Kurangnya pemahaman terhadap tupoksi aparaturnya ;
- Pelaksanaan yang sangat hati-hati dan taat aturan yang ada ;
- Dinamika politik yang berkembang mempengaruhi pengambilan kebijakan

E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Program/kegiatan yang realisasi kinerja hasil/keluarannya tidak mencapai atau memenuhi target yang direncanakan akan mempunyai implikasi (akibat langsung ) terhadap target capaian program Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus tahun 2018-2023. Dengan adanya program/kegiatan yang realisasi kinerja hasil/keluarannya tidak mencukupi/memenuhi target yang direncanakan maka capaian sasaran program dan kegiatan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus tahun 2018 – 2023 juga tidak akan mencapai target yang direncanakan. Kondisi ini membuat kerja keras semua aparat di sekretariat DPRD supaya pada tahun berikutnya bisa memenuhi target yang ditetapkan.

F. Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut yaitu :

Melakukan koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD khususnya Alat Kelengkapan Dewan yang terkait terhadap kegiatan yang belum memenuhi target di atas.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus memberi gambaran target dan capaian pelayanan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Di tahun 2019 target dan capaian pelayanan Sekretariat DPRD telah terpenuhi. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus tertuang dalam Tabel 2.2 sebagaimana terlampir.

### **2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

- a. Sarana prasarana, jumlah pegawai dan struktur organisasi serta jumlah anggaran yang ada merupakan solusi yang dapat dimanfaatkan dan digerakkan dalam melaksanakan tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus
- b. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD, merupakan tantangan yang harus direspon dengan baik melalui dukungan kinerja Sekretariat DPRD
- c. Hubungan koordinasi dan lingkungan kerja yang harmonis dan mantab antar lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah serta dukungan partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menumbuhkan semangat kerja untuk melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus.
- d. Visi dan misi Kepala Daerah yang telah dirumuskan untuk dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD melalui tujuan yang jelas dan terarah.

### **2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus serta mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus.

Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus.

Guna mencapai target sasaran kinerja Sekretariat DPRD diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Sebagai gambaran perencanaan awal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), seiring dengan dinamika kebutuhan dan mengakomodir kebijakan pemerintah, maka Sekretariat DPRD melakukan review atas rancangan awal RKPD yang tertuang dalam tabel 2.4 sebagaimana terlampir .

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2021

Nama SKPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kerja	Kebutuhan Dana /	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kerja	Kebutuhan Dana /	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.01.0 4.07	Program pelayanan administrasi umum		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82		
			Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	100%		Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	100%		
			Persentase Penyerapan anggaran SOPD	70%		Persentase Penyerapan anggaran SOPD	70%		
4.01.04 .07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Kab.Ku dus	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan		15.000.000	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	Kab.Ku dus	32.583.000,-	
			Penyusunan dokumen perencanaan: Renstra,Renja, RenjaPerubahan,LPPD,Evaluasi Renja, Hasil Survey Kepuasan Dewan, Dokumen SAKIP	10 dok		Penyusunan renstra dan renja (renja awal, renja perubahan, evaluasi renja) perangkat daerah	4 dok	1.152.000	
						Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	10 dok	2.900.000	
						Penyusunan dokumen evaluasi Perangkat Daerah	1 dok	386.000	
						Koordinasi dan sinkronisasi perangkat daerah	6 org	27.300.000	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dok	845.000	

4.01.04 .07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Kabupaten Kudus			95.000.000,-			156.397.000,-	
			<b>Jumlah dokumen pengelolaan keuangan PD</b>	12 dok		<b>Jumlah dokumen pengelolaan keuangan PD</b>	12 dok	5.235.000,-	
			Dokumen pengelolaan keuangan : RKA,RKA perubahan, DPA,DPPA,LKPD,Laporan Keuangan bulanan			Dokumen pengelolaan keuangan : RKA,RKA perubahan, DPA,DPPA,LKPD,Laporan Keuangan bulanan			
			<b>Jumlah pelaksana kegiatan</b>	23 org		<b>Jumlah pelaksana kegiatan</b>	34 org	151.162.000,-	
			<i>Honorarium pengelola kegiatan dan uang lembur PNS</i>			<i>Honorarium pengelola kegiatan dan uang lembur PNS</i>			
4.01.04 .07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Kabupaten Kudus			3.064.920.000		Kabupaten Kudus	3.479.493.000	
			<b>Jumlah asset kantor (tanah dan asuransi gedung ) yang terbayar</b>			<b>Jumlah asset kantor (tanah dan asuransi gedung ) yang terbayar</b>			
			Belanja sewa tanah dan asuransi barang milik daerah	2 unit		Belanja sewa tanah dan asuransi barang milik daerah	2 unit	151.000.000	
			<b>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor</b>			<b>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor</b>			
			Belanja peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis		Belanja peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	158.660.000	
			<b>Jumlah sarpras kantor (kendaraan dinas) yang terpelihara</b>			<b>Jumlah sarpras kantor (kendaraan dinas) yang terpelihara</b>			
			Belanja pemeliharaan kendaraan dinas ( servise, suku cadang, BBM,STNK)	50 unit		Belanja pemeliharaan kendaraan dinas ( servise, suku cadang, BBM,STNK)	50 unit	472.241.000	
			<b>Jumlah sarpras kantor yang terpelihara</b>			<b>Jumlah sarpras kantor yang terpelihara</b>			
			Belanja pemeliharaan mebeleur dan sarpras kantor lainnya	30 buah		Belanja pemeliharaan mebeleur dan sarpras kantor lainnya	30 buah	37.016.000	
			Belanja Pemeliharaan/service perlengkapan kantor	18 jenis		Belanja Pemeliharaan/service perlengkapan kantor	18 jenis	96.150.000	



			<b>Jumlah peralatan Rumah Tangga</b>			<b>Jumlah peralatan Rumah Tangga</b>		
			Belanja peralatan rumah tangga	9 jenis		Belanja peralatan rumah tangga	9 jenis	63.290.000
			Belanja peralatan rumah tangga bahan pembersih dan jasa kebersihan kantor	40 jenis		Belanja peralatan rumah tangga bahan pembersih dan jasa kebersihan kantor	40 jenis	803.697.000
			<b>Jumlah gedung yang terpelihara</b>			<b>Jumlah gedung yang terpelihara</b>		
			Belanja Pemeliharaan (gedung,taman,bangunan,hidran,pagar lt.2/lanjutan) dan jasa tenaga keamanan kantor	6 paket		Belanja Pemeliharaan (gedung,taman,bangunan,hidran,pagar lt.2/lanjutan) dan jasa tenaga keamanan kantor	6 paket	1.206.001.000
			<b>Jumlah pengadaan sarpras kantor</b>			<b>Jumlah pengadaan sarpras kantor</b>		
			Belanja pengadaan kendaraan dinas	1 unit		Belanja pengadaan kendaraan dinas	1 unit	30.000.000
			<b>Jumlah pakaian dinas yang disediakan</b>			<b>Jumlah pakaian dinas yang disediakan</b>		
			Pengadaan pakaian dinas DPRD	240 stel		Pengadaan pakaian dinas DPRD	240 stel	461.438.000
4.01.07.06	Pelayanan Ketatausahaan Umum dan Kepegawaian	Kab.Kudus			2.000.000.000		Kab.Kudus	2.233.049.000
			<b>Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart</b>			<b>Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart</b>		
			Penggandaan dan cetak administrasi umum dan kepegawaian	10 dok		Penggandaan dan cetak administrasi umum dan kepegawaian	10 dok	34.750.000
			<b>Jumlah barang habis pakai penunjang administrasi kantor</b>			<b>Jumlah barang habis pakai penunjang administrasi kantor</b>		
			Belanja air,listrik,dan telpon	3 jenis		Belanja air,listrik,dan telpon	3 jenis	359.000.000
			Belanja Alat Tulis Kantor	71 jenis		Belanja Alat Tulis Kantor	71 jenis	90.286.000
			Belanja Materai	2 jenis		Belanja Materai	2 jenis	13.000.000



4.01.15	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>		<b>Persentase agenda kerja DPRD Yang terealisasi</b>	100%	13.147.987.000	<b>Persentase agenda kerja DPRD Yang terealisasi</b>	100%	17.298.975.000	
4.01.15.10	Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD	Kab.Kudus	<b>Jumlah Rapat yang terealisasi</b>	214 kali	685.050.000	<b>Jumlah Rapat yang terealisasi</b>	214 kali	630.945.000	
			Rapat-rapat alat kelengkapan	193 kali		Rapat-rapat alat kelengkapan	193 kali	276.760.000	
			Rapat-rapat paripurna	21 kali		Rapat-rapat paripurna	21 kali	322.185.000	
			Penggandaan dokumen rapat-rapat kegiatan DPRD	15 dok		Penggandaan dokumen rapat-rapat kegiatan DPRD	15 dok	32.000.000	
4.01.15.11	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab.Kudus		45 org	10.916.253.000		45 org	12.453.480.000	
			<b>Jumlah anggota DPRD yang dipenuhi layanan kesehatan</b>			<b>Jumlah anggota DPRD yang dipenuhi layanan kesehatan</b>			
			Jasa jaminan pelayanan kesehatan DPRD	45 org		Jasa jaminan pelayanan kesehatan DPRD	45 org	114.910.000	
			<b>Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan</b>			<b>Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan</b>			
			Kunjungan Kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	45 org		Kunjungan Kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	45 org	63.720.000	
			Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah,workshop,kunker dan konsultasi	45 org		Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah,workshop,kunker dan konsultasi	45 org	11.328.850.000	
			Honorarium tenaga ahli fraksi /tenaga fraksi dan tim ahli	39 org		Honorarium tenaga ahli fraksi /tenaga fraksi dan tim ahli	39 org	946.000.000	
4.01.15.12	Fasilitasi Pengkajian perundang-undangan dan penyusunan produk hukum	Kab.Kudus			1.546.684.000		Kab.Kudus	4.214.550.000	
			<b>Jumlah Perda yang ditetapkan</b>	12 perda		<b>Jumlah Perda yang ditetapkan</b>	12 perda		

			Pembahasan rancangan peraturan daerah	12 perda		Pembahasan rancangan peraturan daerah	12 perda	2.591.704.000	
			Penyelenggaraan kajian ranperda	12 perda		Penyelenggaraan kajian ranperda	12 perda	810.444.000	
			Kegiatan Hearing	1 kali		Kegiatan Hearing	1 kali	44.085.000	
			Kegiatan Reses	2 kali		Kegiatan Reses	2 kali	668.337.000	
			<b>Jumlah dokumen produk hukum</b>	50 dok		<b>Jumlah dokumen produk hukum</b>	50 dok		
			Penyusunan Naskah Akademik	2 dok		Penyusunan Naskah Akademik	2 dok	99.980.000	
<b>4.01.4 3</b>	<b>Program Penyelenggaraan Kehumasan</b>		<b>Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan</b>	<b>100%</b>	610.848.000	<b>Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan</b>	<b>100%</b>	601.105.000	
			<b>Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan</b>	120 kali		<b>Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan</b>	148 kali		
			Majalah publikasi kegiatan DPRD			Majalah publikasi kegiatan DPRD		75.700.000	
			Penayangan kegiatan DPRD di media cetak,iklan,pemeliharaan baliho,dan shooting			Penayangan kegiatan DPRD di media cetak,iklan,pemeliharaan baliho,dan shooting		408.500.000	
			Kalender, baterai, CD blank,RW,album foto, MMC,cetak foto			Kalender, baterai, CD blank,RW,album foto, MMC,cetak foto		43.705.000	
			Langganan internet dan redesign simleg			Langganan internet dan pulsa listrik		70.800.000	
			Honor penyusun naskah/makalah			Honor penyusun naskah/makalah		2.400.000	
<b>TOTAL</b>					<b>18.933.755.000</b>			<b>23.801.602.000</b>	

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprinsip pada pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang. Untuk mencapai keberlanjutan yang holistik diperlukan keterpaduan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah menekankan strategi pembangunan yang berkelanjutan yaitu *pro-growth, pro job, dan pro environment*. Hal ini dilaksanakan dengan menerapkan model pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan atau *green economy*.

Secara umum, prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan telah diterapkan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan. Namun, masih diperlukan sistem dan mekanisme yang efektif untuk implementasi program-program pembangunan secara terpadu dan terarah.

Prioritas pembangunan nasional meliputi 11 yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dan 3 prioritas lainnya. Prioritas tersebut dijabarkan ke dalam berbagai sasaran dan kebijakan.

Sebagai kelanjutan dari capaian yang telah diperoleh dan permasalahan yang dihadapi, arah kebijakan pembangunan berkelanjutan tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus mempunyai sasaran yang akan dicapai yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kudus. Untuk Kebijakan ini diwujudkan melalui Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik disinkronkan dengan kebijakan pelayanan masyarakat yang

berkualitas didukung oleh teknologi informasi dengan diterapkan pada kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan meliputi semua kegiatan - kegiatan DPRD pada tahun berjalan.

2) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah .

Untuk kegiatan ini diwujudkan dalam peningkatan kualitas pelayanan public kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD**

#### **3.2.1 Tujuan**

Mengacu pada visi Kepala Daerah Kabupaten Kudus yaitu **” KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA”** serta misinya yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia;
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik;
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif;
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing ;

Untuk Sekretariat DPRD mengacu pada misi ke dua yaitu **“ MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN HANDAL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK “**

Maka **Tujuan** yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

” Meningkatkan kepuasan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif ”

#### **3.2.2 SASARAN**

Adapun sasaran yang ingin dicapai secara nyata berdasarkan tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

### **3.3 Program dan Kegiatan**

#### **a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah RPJMD Kabupaten Kudus, Renstra Sekretariat DPRD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus tahun 2021. Rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021 terdapat sebanyak 3 Program dengan 8 kegiatan.

#### **b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi Jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya**

Adapun uraian Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Umum.  
Kegiatan :
  - a. Peningkatan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja
  - b. Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan
  - c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana
  - d. Pelayanan Ketatausahaan Umum dan Kepegawaian
2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah  
Kegiatan :
  - a. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD
  - b. Peningkatan Kapasitas DPRD

- c. Fasilitasi Pengkajian Perundang-undangan dan Penyusunan produk hukum
- 3. Program Penyelenggaraan Kehumasan
  - a. Fasilitasi Kehumasan, Publikasi dan Protokol

Rencana kerja berupa program, kegiatan, lokasi dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan perkiraan maju tahun 2022 tertuang dalam rancangan awal RKPD Tahun 2021 yang tertuang dalam Tabel Rencana Program, Kegiatan Indikator Kerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagaimana terlampir.

Rencana Kerja berupa program dan kegiatan yang sebelumnya dibuat sesuai dengan rancangan awal RKPD tahun 2021, untuk selanjutnya disesuaikan dengan Permendagri No 90 tahun 2019 yang tertuang dalam Tabel Pemetaan Program dan Kegiatan sebagaimana terlampir .



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS

TINGKAT : RKP

OPD : 4.01.04 : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				23.801.602.000				18.949.875.000	
4.01.07	Program pelayanan administrasi umum				5.901.522.000				5.179.326.000	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		83						
4.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja		Kabupaten Kudus		32.583.000	APBD;			15.000.000	
		jumlah data/dokumen perencanaan, dan pelaporan sesuai ketentuan		19,00 Dok				10,00		
		Penyusunan renstra dan renja ( Renja Awal, Renja Perubahan, Evaluasi Renja ) perangkat daerah	Kab. Kudus	4 Dok	1.152.000	APBD				Usulan OPD
		Penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan	Kab. Kudus	10 Dok	2.900.000	APBD				Usulan OPD
		Penyusunan dokumen evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Kudus	1 Dok	386.000	APBD				Usulan OPD
		Koordinasi dan sinkronisasi Perangkat Daerah	Kab. Kudus	6 Org	27.300.000	APBD				Usulan OPD
		Evaluasi dan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kudus	4 Dok	845.000	APBD				Usulan OPD
4.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan		Kabupaten Kudus		156.397.000	APBD;			95.000.000	
		jumlah dokumen pengelolaan keuangan PD		12,00 Dok				12,00		
		jumlah pelaksana kegiatan		34,00 Org				23,00		
		Honorarium pengelola kegiatan dan uang lembur PNS	Kab. Kudus	34 Org	151.162.000	APBD				Usulan OPD
		Penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan	Kab. Kudus	12 Dok	5.235.000	APBD				Usulan OPD
4.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur		Kabupaten Kudus		3.479.493.000	APBD;			3.069.326.000	
		Jumlah Sarpras kantor ( kendaraan dinas ) yang terpelihara		50,00 Unit				52,00		
		Jumlah Sarpras kantor ( peralatan kantor yang terpelihara )		18,00 Jenis				18,00		
		jumlah peralatan rumah tangga		50,00 Jenis				64,00		
		jumlah gedung yang terpelihara		6,00 Pkt				5,00		
		Jumlah pakaian dinas yang disediakan		245,00 Stel				240,00		
		Jumlah Pengadaan sarpras kantor		0,00 Unit				15,00		
		jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		6,00 Jenis				6,00		
		Jumlah asset kantor (tanah dan asuransi gedung) yang terbayar		2,00 Unit				2,00		
		Jumlah sarpras kantor (mebeleur ) yang terpelihara		30,00 Bh				30,00		

		Jumlah sarpras kantor (mebeleur ) yang terpelihara		30,00 Bh				30,00		
		Jumlah Rehab gedung/pembangunan kantor		0,00 Pkt				1,00		
		Jumlah jasa perbaikan peralatan kantor		18,00 Jenis				18,00		
		Belanja sewa tanah dan asuransi barang milik daerah	Kabupaten Kudus	2 Unit	151.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja perlengkapan dan peralatan kantor	Kabupaten Kudus	6 Jenis	158.660.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja pemeliharaan kendaraan dinas (service,suku cadang,BBM,STNK)	Kabupaten Kudus	50 Unit	472.241.000					Usulan OPD
		Belanja pemeliharaan mebeleur dan sarpras kantor lainnya	Kabupaten Kudus	30 Bh	37.016.000					Usulan OPD
		Belanja peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Kudus	9 Jenis	63.290.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja peralatan rumah tangga bahan pembersih dan jasa kebersihan kantor	Kabupaten Kudus	40 Jenis	803.697.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja pemeliharaan ( gedung,taman,bangunan,hydran,pagar lt.2/lanjutan,ralling pagar lt.2/lanjutan)dan jasa tenaga keamanan kantor	Kabupaten Kudus	6 Pkt	1.206.001.000	APBD				Usulan OPD
		Pengadaan pakain dinas DPRD	Kabupaten Kudus	245 Stel	461.438.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Pemeliharaan / service perlengkapan kantor	Kabupaten Kudus	18 Jenis	96.150.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja pengadaan kendaraan dinas	Kab. Kudus	1 Unit	30.000.000	APBD				Usulan OPD
4.01.07.06	Pelayanan Ketatausahaan Umum dan Kepegawaian		Kabupaten Kudus		2.233.049.000	APBD;			2.000.000.000	
		Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart		10,00 Dok				10,00		
		Jumlah barang habis pakai penunjang administrasi kantor		107,00 Jenis				93,00		
		Jumlah jasa tenaga kontrak/tenaga pelaksana kegiatan Pramu Tamu,Sarpras,IT dan pengemudi		19,00 Org				55,00		
		Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat		34,00 Org				42,00		
		Jumlah kegiatan perjalanan dinas		30,00 Kali				30,00		
		Jumlah honorarium non PNS		42,00 Org				3,00		
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan		3,00 Jenis				3,00		
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan		10,00 Jenis				10,00		
		Penggandaan dan cetak adminitrasi umum dan kepegawaian	Kab. Kudus	10 Dok	34.750.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja air, listrik dan telepon	Kab. Kudus	3 Jenis	359.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Alat Tulis Kantor	Kab. Kudus	71 Jenis	90.286.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja materi	Kab. Kudus	2 Jenis	13.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja alat listrik / komponen listrik	Kab. Kudus	23 Jenis	24.400.000	APBD				Usulan OPD

		Belanja makanan dan minuman harian pegawai , tamu dan kegiatan lainnya	Kab. Kudus	8 Jenis	474.819.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja jasa tenaga pelaksana kegiatan (pramu tamu, pengemudi, IT, sarpras)	Kab. Kudus	13 Org	288.340.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan ( Sarpras, IT, Pramu Tamu, Pengemudi, PHD )	Kab. Kudus	19 Org	66.240.000	APBD				Usulan OPD
		Honorarium Non PNS dan Uang lembur non PNS	Kab. Kudus	42 Org	146.864.000	APBD				Usulan OPD
		Bintek Implementasi dan peraturan perundang-undangan	Kab. Kudus	20 Org	283.290.000	APBD				Usulan OPD
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab. Kudus	34 Org	144.500.000	APBD				Usulan OPD
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Kudus	3 Jenis	48.960.000	APBD				Usulan OPD
		Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi Sekretariat DPRD	Kab. Kudus	30 Kali	258.600.000	APBD				Usulan OPD
<b>4.01.15</b>	<b>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b>				<b>17.298.975.000</b>				<b>13.159.181.000</b>	
		<b>persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi</b>		<b>100%</b>						
4.01.15.10	Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD		Kabupaten Kudus		630.945.000	APBD;			685.050.000	
		Jumlah rapat yang terfasilitasi		214,00 Kali				330,00		
		Rapat-Rapat Alat Kelengkapan	Kab. Kudus	193 Kali	276.760.000	APBD				Usulan OPD
		Rapat-Rapat Paripurna	Kab. Kudus	21 Kali	322.185.000	APBD				Usulan OPD
		Penggandaan dokumen rapat - rapat kegiatan DPRD	Kab. Kudus	15 Dok	32.000.000	APBD				Usulan OPD
4.01.15.11	Peningkatan kapasitas DPRD		Kabupaten Kudus		12.453.480.000	APBD;			10.927.447.000	
		Jumlah anggota DPRD yang dipenuhi layanan kesehatan		45,00 Org				45,00		
		Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan		45,00 Org				45,00		
		Jasa jaminan layanan kesehatan	Kab. Kudus	45 Org	114.910.000	APBD				Usulan OPD
		Kunjungan kerja DPRD dalam daerah	Kab. Kudus	45 Org	63.720.000	APBD				Usulan OPD
		Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar propinsi, konsultasi dalam dan luar propinsi, workshop	Dalam Propinsi dan luar propinsi	45 Org	11.328.850.000	APBD				Usulan OPD
		Honorarium Tenaga Ahli Fraksi / tenaga fraksi dan Tim ahli	Kab. Kudus	39 Org	946.000.000	APBD				Usulan OPD
4.01.15.12	Fasilitasi pengkajian perundang-undangan dan penyusunan produk hukum		Kabupaten Kudus		4.214.550.000	APBD;			1.546.684.000	
		Jumlah Perda yang ditetapkan		12,00 Perda				12,00		
		Jumlah dokumen produk hukum		50,00 Dok				150,00		
		Pembahasan rancangan peraturan daerah	Dalam dan Luar Propinsi	12 Perda	2.591.704.000	APBD				Usulan OPD
		Penyelenggaraan kajian Ranperda	Dalam dan luar propinsi	12 Perda	810.444.000	APBD				Usulan OPD
		Hearing	Kabupaten Kudus	1 Kali	44.085.000	APBD				Usulan OPD
		Reses	Kabupaten Kudus	2 Kali	668.337.000	APBD				Usulan OPD
		Penyusunan Naskah Akademik	Kabupaten Kudus	2 Dok	99.980.000	APBD				Usulan OPD

4.01.43	Program penyelenggaraan kehumasan				601.105.000			611.368.000	
		persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan		100%					
4.01.43.02	Fasilitasi kehumasan, publikasi dan protokol		Kabupaten Kudus		601.105.000	APBD;		611.368.000	
		Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan		148,00 Kali			120,00		
		Majalah publikasi kegiatan DPRD	Kab. Kudus	500 Eksp	75.700.000	APBD			Usulan OPD
		Penayangan kegiatan DPRD di media cetak, iklan, pemeliharaan baliho, dan shooting	Kab. Kudus	160 Kali	408.500.000	APBD			Usulan OPD
		Kalender, baterai, CD blank, CD RW, album foto, MMC, cetak foto	Kab. Kudus	7000 Bh	43.705.000	APBD			Usulan OPD
		Langganan internet dan pulsa listrik	Kab. Kudus	1 Thn	70.800.000	APBD			Usulan OPD
		honor penyusun naskah/makalah	Kab. Kudus	12 Tema	2.400.000	APBD			Usulan OPD
		<b>J U M L A H</b>			<b>23.801.602.000</b>			<b>18.949.875.000</b>	

Mengetahui,  
 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN KUDUS



*[Signature]*  
 Drs. JADMIKO MUHARDI SETIYANTO  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19691005 199001 1 001

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan tahun 2021 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Program Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah . Rencana Program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Perangkat Daerah ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja tahun 2021 disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus.


Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus tahun 2021 akan dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan, dan juga sebagai acuan kegiatan dan indikator pengukuran kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus sebagai bagian dari instansi Pemerintah Kabupaten Kudus.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus tahun 2021 dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

Disamping hal tersebut Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dalam pelaksanaannya juga memperhatikan dan menyesuaikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku disertai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Kudus, 2020

**SEKRETARIS DPRD**



**Drs. JADMIKO MUHARDI SETIYANTO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691005 199001 1 001

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

TABEL PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019												
KODE					URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	
					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah			
4	02	01	2	01			Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah data/dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	24	dok	
4	02	01	2	01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah dokumen penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah	19	dok	31,352,000
4	02	01	2	01	07			Evaluasi Kinerja PD	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah	5	dok	3,073,000
4	02	01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52	dok	
4	02	01	2	02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penerima gaji dan tunjangan ASN	40	dok	5,751,521,058
4	02	01	2	02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaporan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar	12	dok	5,235,000
	02	01	2	03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah aset kantor yang terbayar	2	unit	
4	02	01	2	03	02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah sewa tanah dan premi asuransi kebakaran gedung yang terbayar	2	unit	151,000,000
4	02	01	2	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	53	orang	
4	02	01	2	05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat mengetahui kinerja aparatur	34	orang	144,500,000



PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019													
KODE						URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		PAGU (Rp.)
4	02	01	2	05	11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat mengenai implementasi perundang-undangan	19	orang	285,089,000
4	02	01	2	06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	sub kegiatan	
4	02	01	2	06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	3	jenis	24,399,000
4	02	01	2	06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang habis pakai penunjang administrasi kantor, Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	80	jenis	248,941,000
4	02	01	2	06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan Rumah Tangga	9	jenis	68,289,300
4	02	01	2	06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	8	jenis	474,802,000
4	02	01	2	06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	6	jenis	34,748,300
4	02	01	2	06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan per UUan	3	jenis	47,853,000
4	02	01	2	06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan perjalanan dinas	30	kali	262,784,000
4	02	01	2	07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan sarpras kantor	1	unt	
4	02	01	2	07	02				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan sepeda motor/ operasional	1	unit	31,288,000
4	02	01	2	08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	sub kegiatan	
4	02	01	2	08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	2	jenis	13,100,000
4	02	01	2	08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3	jenis	430,166,342
4	02	01	2	08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelaksana kegiatan dan tenaga kontrak yang terbayar	7	kegiatan	1,580,293,000
4	02	01	2	09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah aset kantor yang terpelihara	91	unit /jenis	

PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019													
KODE						URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		PAGU (Rp.)
4	02	01	2	09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, sarpras kantor (kendaraan dinas/operasional) yang terpelihara	40	unit	437,510,000
4	02	02	2	09	05				Pemeliharaan Mebel	Jumlah sarpras kantor (mebeleur) yang terpelihara	30	unit	28,940,000
4	02	01	2	09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/rehabilitasi	3	unit	1,083,435,000
4	02	01	2	09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras kantor (peralatan kantor) yang terpelihara	18	jenis	112,537,000
4	02	01	2	15				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jumlah fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	3	kegiatan	
4	02	01	2	15	01				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang dipenuhi layanan keuangan	45	orang	29,330,662,000
4	02	01	2	15	02				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jenis dan jumlah pakaian dinas beserta atribut yang disediakan	229	stel	591,085,000
4	02	01	2	15	03				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang dipenuhi layanan kesehatan	45	orang	124,909,000
4	02	01	2	16				Layanan Administrasi DPRD		Jumlah layanan administrasi DPRD	188	kali	
4	02	01	2	16	03				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat yang terfasilitasi	188	kali	672,683,000
4	02	02						PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100	%	
4	02	02	2	01					Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	13	kali	
4	02	02	2	01	01				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah fasilitasi tugas Bapemperda dalam/luar propinsi	4	kali	410,662,000
4	02	02	2	01	02				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah fasilitasi tugas DPRD terkait pembahasan ranperda	4	kali	1,653,248,000
4	02	02	2	01	03				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah fasilitasi kegiatan kajian ranperda	3	kali	1,034,694,000
4	02	02	2	01	04				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah fasilitasi penyusunan NA	2	dok	100,000,000

PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019											
KODE					URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
4	02	02	2	02			Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah fasilitasi tugas Badan Anggaran yang terealisasi	4 kali	
4	02	02	2	02	03			Pembahasan APBD	Jumlah fasilitasi tugas Badan Anggaran dalam/luar Propinsi	4 kali	830,244,000
4	02	02	2	03			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah fasilitasi kegiatan pengawasan Pemerintahan yang dilakukan DPRD	32 kali	
4	02	02	2	03	01			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah fasilitasi tugas komisi A dalam/luar propinsi	8 kali	986,424,000
4	02	02	2	03	02			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah fasilitasi tugas komisi C dalam/luar propinsi	8 kali	1,284,604,000
4	02	02	2	03	03			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah fasilitasi tugas komisi D dalam/luar propinsi	8 kali	1,198,476,000
4	02	02	2	03	04			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah fasilitasi tugas komisi B dalam/luar propinsi	8 kali	1,120,032,000
4	02	02	2	04			Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah fasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	142 kali	
4	02	02	2	04	02			Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan Bintek DPRD	4 kali	1,378,392,000
4	02	02	2	04	03			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD yang dipublikasikan	122 kali	539,205,000
4	02	02	2	04	04			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah fasilitasi kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	8 kali	597,900,000
4	02	02	2	04	05			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah fasilitasi tenaga ahli fraksi yang tersedia	8 orang	348,000,000
4	02	02	2	05			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah fasilitasi kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat	12 kali	
4	02	02	2	05	01			Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah fasilitasi kegiatan fasilitasi tugas DPRD dalam Daerah	10 kali	63,600,000
4	02	02	2	05	02			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			
4	02	03	2	05	03			Pelaksanaan Reses	Jumlah fasilitasi kegiatan Reses	2 kali	668,337,000
4	02	02	2	06			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah fasilitasi Badan Kehormatan yang terealisasi	4 kali	
4	02	02	2	06	02			Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah fasilitasi tugas Badan Kehormatan dalam/luar propinsi	4 kali	182,048,000

## PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019

KODE					URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		PAGU (Rp.)
4	02	02	2	08			Fasilitasi Tugas DPRD		Jumlah fasilitasi tugas DPRD	91	kali	
4	02	02	2	08	01			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi tugas, koordinasi, konsultasi alat kelengkapan DPRD	18	kali	1,881,448,000
4	02	02	2	08	03			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah fasilitasi tugas Banmus dalam/luar propinsi	4	kali	852,788,000
4	02	02	2	08	04			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	jumlah fasilitasi Penyusunan naskah , fasilitasi tugas ,koordinasi, konsultasi Pimpinan DPRD	69	kali	1,783,488,000
												58,883,785,000